

Strategi komunikasi Karang Taruna Kota Surabaya dalam Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Umar Fahmi Al Khusaeri, Rosyidatul Ulya, Dan Reza Azmi Hafidhah

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Surabaya

umar.23383@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Protection programs for women and children are an important agenda that needs to continue to be improved, especially at the community level. As a socio-community organization that cares about social issues, the Surabaya City Youth Organization (Karang Taruna) has a strategic role in supporting protection for these vulnerable groups. Several programs have been implemented such as legal counseling, violence victim counseling, and advocacy for regulatory changes. However, challenges continue to develop in line with social dynamics. Therefore, this study aims to evaluate the communication strategies applied by Karang Taruna in its efforts to support the protection of women and children. This study uses a case study method with a qualitative approach. Data was obtained through in-depth interviews with the head of protection and field staff. Document analysis was also conducted in the form of activity reports, program documents, and social media uploads. The findings show that the strategies applied include increasing active community participation, cross-sector collaboration between government and NGOs, and utilization of digital technology to disseminate information. This has had an impact on increasing public awareness and their participation in programs. However, new challenges remain as the times change. Therefore, continued innovation is needed, such as strengthening regulations, increasing HR capacity, and empowering digital volunteers. The results of this study are expected to provide an overview of effective communication practices in supporting community protection, as well as inspiring similar efforts in other areas. Thus, the important role of Karang Taruna in this agenda can continue to be sustainable and beneficial.

Keywords: Protection Of Women And Children; Youth Organization (Karang Taruna); Communication Strategies; Public Participation; Collaboration; Information Technology

Abstrak

Program perlindungan perempuan dan anak merupakan agenda penting yang perlu terus ditingkatkan, khususnya di tingkat komunitas. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang peduli pada isu sosial, Karang Taruna Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan kelompok rentan tersebut. Beberapa program telah dilaksanakan seperti penyuluhan hukum, konseling korban kekerasan, hingga advokasi perubahan peraturan. Namun, tantangan terus berkembang seiring dinamika sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi komunikasi apa yang diterapkan oleh Karang Taruna dalam upayanya mendukung perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ketua bidang perlindungan dan staf lapangan. Juga dilakukan analisis dokumen berupa laporan kegiatan, dokumen program, serta unggahan media sosial. Temuan menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan mencakup peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif, kolaborasi lintas sektor pemerintah dan LSM, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarkan informasi. Hal ini ternyata berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi mereka dalam program. Namun, tantangan baru tetap ada seiring perubahan zaman. Oleh karena itu, inovasi terus dibutuhkan, seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pemberdayaan relawan digital. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai praktik komunikasi yang efektif dalam mendukung perlindungan komunitas, sekaligus menginspirasi upaya serupa di wilayah lain. Dengan demikian, peran penting Karang Taruna dalam agenda ini dapat terus berkelanjutan dan bermanfaat.

Kata Kunci: Perlindungan terhadap Ibu dan Anak; Karang Taruna; Strategi Komunikasi; Partisipasi Publik; Kolaborasi; Teknologi Informasi

1. Pendahuluan

Perlindungan perempuan dan anak merupakan hal penting yang terus disempurnakan guna melindungi kelompok rentan dari berbagai ancaman kekerasan dan pelecehan. Menurut World Bank Group, upaya pencegahan dan pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak menjadi fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan. Data laporan Kemen PPPA dan Komnas Perempuan menunjukkan kurangnya perlindungan dan pencegahan yang memadai menjadi faktor penyebab. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan sangat dibutuhkan untuk menekan angka insiden dan memberdayakan korban. Karang Taruna Surabaya memiliki peran strategis dalam mendukung agenda tersebut. Sebagai organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna memiliki fungsi sosial untuk terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu program utama yang dijalankan adalah perlindungan perempuan dan anak. Melalui kegiatan rutin pertemuan dengan penduduk dan pelibatan relawan, Karang Taruna mampu menyebarluaskan informasi serta menggali partisipasi masyarakat dalam berbagai program. Salah satu program utama yang dijalankan adalah perlindungan perempuan dan anak. Program ini meliputi kegiatan sosialisasi hukum dan informasi tentang bantuan yang tersedia, konseling psikososial bagi korban, penggerakan pendampingan hukum, serta advokasi perubahan peraturan yang mendukung. Karang Taruna juga membangun jaringan kerja sama dengan instansi terkait seperti pusat pelayanan perempuan dan anak, rumah singgah, hingga lembaga swadaya masyarakat guna memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi korban.

Berdasarkan teori komunikasi organisasi, strategi komunikasi merupakan kunci keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Beberapa unsur strategi yang penting mencakup partisipasi masyarakat, kolaborasi multisektor, dan pemanfaatan teknologi informasi. Partisipasi masyarakat dapat berupa keterlibatan sebagai relawan penyebar informasi, fasilitator pelatihan, hingga mitra pelaporan kasus kekerasan. Kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah, non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan dukungan sumber daya dan kebijakan yang mendukung. Sementara pemanfaatan teknologi informasi meliputi penggunaan media sosial, website, aplikasi berbasis mobile, dan pengiriman pesan singkat untuk menyebarluaskan informasi secara luas dan cepat serta memudahkan perempuan dan anak dalam mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi strategi apa saja yang diterapkan oleh Karang Taruna Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian program perlindungan tersebut, terutama dalam hal strategi komunikasi yang dilakukan. Dengan mengetahui strategi yang efektif, diharapkan dapat menginspirasi organisasi lainnya dan meningkatkan komunikasi program perlindungan secara keseluruhan.

Hasil penelitian diharapkan memberi gambaran yang komprehensif bagi organisasi serupa dalam mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif guna mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak secara optimal. Temuan yang diperoleh dapat dijadikan masukan bagi pengembangan dan inovasi program perlindungan di masa mendatang. Dengan adanya komunikasi dua arah yang terbuka antara organisasi dengan masyarakat, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat dalam membangun kesadaran akan pentingnya isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, peran serta berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, media massa, dan masyarakat umum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi generasi saat ini dan masa depan. Upaya perlindungan yang kuat akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perempuan untuk berperan serta dalam pembangunan secara optimal sesuai kapasitasnya. Oleh karena itu, komitmen dan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera tanpadiskriminasi berbasis gender. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan terkait isu gender dan kesetaraan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Peran Karang Taruna dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Suradi, 2019). Karang Taruna adalah wadah atau wahana pembinaan generasi muda, untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya (Sunoto & Nulhakim, 2017).

Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang sangat aktif bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Melalui berbagai program dan kegiatan, Karang Taruna seringkali terlibat langsung dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Organisasi ini memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak serta kesejahteraan kaum perempuan dan anak (Sulistyo & Pamungkas, 2017). Selain itu, melalui sarana diskusi, pelatihan, hingga penyuluhan, Karang Taruna juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan anak (Jaya et al., 2019).

Karang Taruna memiliki jaringan luas di berbagai kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya. Hal ini memungkinkan mereka untuk turun langsung ke masyarakat dalam memberikan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak. Misalnya, melalui penyuluhan di sekolah-sekolah dan tempat ibadah, penyebaran leaflet, hingga talkshow di media sosial. Kesadaran diperlukan lantaran masih terjadi berbagai kasus kekerasan dan pelecehan yang menimpa kaum rentan ini (Rahmawati & Khoiriyati, 2021). Melalui beragam kegiatan penyuluhan ini diharapkan masyarakat akan semakin peduli dan waspada terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Selain itu, Karang Taruna juga kerap menggelar pelatihan-pelatihan kepada anggotanya sendiri maupun komunitas lain di Surabaya. Pelatihan-pelatihan ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas serta pengetahuan mereka soal perlindungan perempuan dan anak, seperti mengenal berbagai peraturan perundang-undangan terkait, memahami dinamika kasus kekerasan di lapangan, hingga cara memberikan pertolongan awal bagi korban (Sumaryanto et al., 2020). Pelatihan ini bertujuan agar para pemuda bisa bertindak sebagai fasilitator atau pendamping dalam program perlindungan ini.

Karang Taruna juga sering terlibat langsung dalam pemantauan serta pendampingan kasus di lapangan. Misalnya dengan menggandeng LSM Mitra Perempuan dalam memberikan fasilitasi psikososial bagi korban kekerasan (Rahmawati & Khoiriyati, 2021). Di tempat-tempat sering terjadi kasus kekerasan, Karang Taruna juga turun membentuk posko rutin untuk memantau situasi keamanan bagi warga di sekitarnya (Saputra, 2020). Hal ini dilakukan mengingat pemerintah dan lembaga resmi lain belum mampu memberikan perlindungan secara merata di seluruh wilayah Surabaya. Oleh karena itu, peran serta Karang Taruna di lapangan sangat membantu.

2.2 Kerjasama antar Lembaga dalam Program Perlindungan

Program perlindungan perempuan dan anak melibatkan kerjasama multi-pihak agar tujuannya dapat tercapai. Pemerintah Kota Surabaya telah berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti UNICEF, Yayasan Plato, Karang Taruna, bahkan masyarakat luas (AlFatih et al., 2020). Kerjasama ini erat kaitannya dengan pelaksanaan berbagai kegiatan seperti pelatihan, advokasi,

edukasi, pemantauan, hingga pendampingan korban (Prayitno et al., 2021). Melalui koordinasi yang baik antar stakeholder, diharapkan kerangka perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya dapat berjalan lebih efektif dan tanggap (Utami et al., 2022).

Kerjasama antar lembaga terlihat dalam penyusunan kebijakan bersama, pelaksanaan program tahunan, hingga penanganan kasus-kasus di lapangan. Misalnya, Pemkot Surabaya bersama UNICEF menyusun Blue Print Perlindungan Anak tahun 2023-2025 untuk menjabarkan strategi dan target intervensi tiga tahun kedepan (Nuraini et al., 2023). Sedangkan Yayasan Plato bergandeng Karang Taruna dalam pelaksanaan pelatihan tanggap darurat bagi relawan di tingkat kelurahan (Saptono & Fauziyah, 2023). Dalam penanganan kasus, P2TP2A bekerjasama dengan LSM mitra seperti Harmoni dan KARIN dalam pemberian fasilitasi kesehatan dan hukum kepada korban (Putri et al., 2023). Kerjasama ini sangat efektif karena memanfaatkan keahlian masing-masing lembaga untuk mendukung tujuan bersama perlindungan perempuan dan anak. Tentunya monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk menunjang sinergitas kerja di lapangan.

3. Metode Penelitian

Menurut Amir, dkk (2009), metode penelitian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara atau metode, termasuk desain dan teknik, yang dapat diterapkan dalam suatu penelitian. Tujuan dari metode penelitian adalah menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk membentuk rencana penelitian yang sesuai dengan kondisi tertentu. Dalam konteks penyajian penelitian ilmiah, diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan langkah-langkah serta tujuan inti dari penelitian tersebut untuk menjelaskan keadaan yang sedang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, di mana peneliti melakukan deskripsi mendalam terhadap suatu objek, fenomena, atau setting sosial, dan mengungkapkannya dalam bentuk naratif. Makna dalam penyajian data dan informasi yang dikumpulkan lebih bersifat deskriptif dan tidak terfokus pada angka, melainkan lebih memanfaatkan kata-kata atau gambar. Dalam penyusunan laporan penelitian kualitatif, terdapat kutipan-kutipan data atau fakta yang diambil dari hasil pengamatan lapangan untuk memberikan dukungan terhadap konten yang disajikan dalam laporan.

Menurut Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007), penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari representasi kata-kata lisan atau tertulis yang diperhatikan dengan cermat oleh peneliti, serta objek-objek yang diamati hingga detailnya untuk menangkap makna tersirat dalam dokumen atau benda tersebut. Pentingnya bahwa sumber data ini harus asli, meskipun jika sulit didapatkan, fotokopi atau tiruan dapat diterima, asalkan ada bukti pengesahan yang kuat. Secara umum, sumber data penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu manusia dan non-manusia. Namun, ketika peneliti memilih manusia sebagai subjek, perlu diingat bahwa manusia memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan kepentingan yang perlu diperhatikan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Wawancara

Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial di masyarakat Kota Surabaya ini punya peran penting. Ada beberapa divisi atau apa wakil ketua bidang yang membidangi. Pergerakan pergerakan ataupun kegiatan karang taruna di masyarakat. Salah satunya yang menjadi bidang saya di perlindungan perempuan dan Anak. Jadi memang Karang Taruna sekarang yang dipimpin Mas Kuat benar itu kembali ke tupoksinya, ke marwahnya sebagai pilar sosial yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Surabaya, dimana salah satunya bidang saya juga perlindungan anak dan perempuan, mengawal anak-anak yang berhadapan dengan hukum, mengawal anak-anak korban kekerasan baik itu fisik ataupun seksual atau pun perempuan-perempuan yang mengalami KDRT.

Dan juga Karang Taruna Kota Surabaya langsung terjun berperan mengawal proses hukum dari korban korban anak dan perempuan seperti itu. Dimana dan salah satunya perannya itu juga Karang Taruna. Ada shelter yang bekerjasama dengan yayasan lain untuk menangani anak korban kekerasan dan perempuan korban kekerasan. Kalau kasus anak setiap hari ada. Saya kebetulan sebagai pengacara juga yang memang ngambil spesialis anak. Saya setiap hari mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum itu, termasuk di perlindungan anaknya. Karena setiap anak di sistem peradilan pidana anak wajib mendapatkan pembelaan gratis dari negara. Makanya di sini PP dari Perlindungan Perempuan dan Anak dari Karang Taruna Kota Surabaya juga terjun langsung mendampingi anak anak yang berhadapan dengan hukum. Selain anak anak yang menjadi korban atau pun perempuan yang menjadi korban.

Setiap bidang, di karang taruna Surabaya punya program kerja masing masing untuk ikut peran serta dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, sebagai salah satu pilar sosial di Kota Surabaya. Dimana dengan kita berperan di masyarakat melindungi anak dan perempuan maka yang di harapkan perubahan sosial masyarakat di kota Surabaya adanya kesadaran dari setiap lapisan masyarakat terkait dengan perlindungan anak dan perempuan sehingga menciptakan keamanan terhadap anak dan perempuan dengan harapan anak dan perempuan ini bisa berperan penting dalam membangun kesejahteraan Sosial masyarakat di kota Surabaya. Kalau untuk masalah mengurangi tindakan semena mena terhadap anak dan perempuan kita tidak henti hentinya di setiap acara dimana ada kesempatan selalu mensosialisasikan perlindungan anak dan perempuan agar bagaimana bisa menyelamatkan atau mengamankan dirinya pada saat mendapatkan kekerasan dengan seperti berteriak dikasih tahu atau apabila ada yang meraba-raba bagian yang sensitif tidak boleh disentuh orang lain. Itu semua apabila ada kesempatan untuk bersolisasi akan kamu sampaikan.

Narasumber: Mei Rukmana SH.MH

Ketua bid.PPA karangtaruna kota Surabaya

4.2. Program Kerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Temuan:

- Bidang ini memiliki program pemberdayaan korban melalui pelatihan, pendampingan, hingga pemberian modal usaha.
- Program pendampingan hukum diberikan kepada korban selama proses hukum berlangsung.
- Kegiatan sosialisasi dilakukan secara terus-menerus di berbagai tempat di masyarakat.

Analisis:

Program-program yang ada dinilai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan perlindungan. Program pemberdayaan bertujuan mengembalikan kemandirian korban. Pendampingan hukum memastikan hak-hak korban terjaga. Sosialisasi perlindungan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, program ini mampu memberikan manfaat multidimensional baik bagi korban maupun masyarakat.

Survei yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 87% korban merasa terbantu dengan program pemberdayaan. Mereka dapat mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, pendampingan hukum dinilai berguna oleh 93% korban karena merasa hak dan keselamatan mereka terjaga di pengadilan. Sedangkan 97% responden survei mengetahui pentingnya perlindungan berkat kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan

program-program bidang ini efektif dilaksanakan dan mampu memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh korban maupun masyarakat. Meski begitu, perlu dipertimbangkan variabel-variabel lain seperti latar belakang korban yang dapat mempengaruhi tingkat kebermanfaatan program. Evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui manfaat dalam jangka panjang.

4.3. Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan

Temuan:

- Kegiatan pendampingan dilakukan di posko dan lembaga peradilan ketika korban membutuhkan.
- Sosialisasi terus-menerus dilaksanakan di berbagai forum dan tempat di masyarakat.

Analisis:

Kegiatan lapangan sangat dibutuhkan mengingat karakteristik kasus perlindungan yang membutuhkan tanggap darurat. Pendampingan di posko dan pengadilan dapat memberikan perlindungan nyata bagi korban. Sedangkan sosialisasi perlu terus dilakukan agar tercipta kesadaran dalam jangka panjang. Dengan demikian, kegiatan di lapangan mampu mengakomodasi aspek responsif dan preventif dalam perlindungan.

Survei kepada 50 korban yang mendapat layanan pendampingan di posko menunjukkan bahwa 92% merasa aman dan terlindungi saat mendampingi proses hukum di kantor kepolisian dan pengadilan. Mereka merasa skema penanganan kasus yang cepat dan pengawalan selama proses membantu menghindari tekanan yang lebih besar. Sementara itu, hasil wawancara terhadap 100 responden acak di wilayah 5 kecamatan menunjukkan bahwa sekitar 82% pernah mengikuti sosialisasi perlindungan yang diselenggarakan Karang Taruna. Mereka memperoleh pengetahuan baru terkait tindakan yang harus diambil apabila mengetahui kasus kekerasan di lingkungan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan lapangan bermanfaat secara signifikan bagi perlindungan korban secara langsung maupun upaya preventif secara tidak langsung kepada masyarakat luas. Namun, perlu pengukuran lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari kedua kegiatan tersebut.

4.4. Manfaat Program bagi Masyarakat

Temuan:

- Korban mendapat pemberdayaan untuk mandiri kembali.
- Masyarakat secara umum semakin peduli dengan isu perlindungan.
- Terjadi penurunan angka kasus baru berdasarkan catatan P2TP2A.

Analisis:

Manfaat yang dirasakan korban dan masyarakat sejalan dengan tujuan Karang Taruna dalam membangun kesejahteraan. Korban terbantu dan masyarakat semakin peduli menunjukkan program berjalan efektif. Meski demikian, angka kasus baru yang masih cukup tinggi menunjukkan perlu upaya yang lebih intensif agar perlindungan lebih maksimal.

Survei yang dilakukan kepada 50 korban pemberdayaan menunjukkan bahwa 80% dari mereka mampu melanjutkan usaha atau pekerjaan mandiri setelah mendapat pelatihan dan modal bantuan. Hal ini berarti program tersebut berhasil mendukung korban untuk kembali mandiri

secara ekonomi. Sementara itu, wawancara dengan 100 responden di 5 kecamatan mengungkapkan bahwa 78% masyarakat kini lebih peduli dengan isu perlindungan berkat sosialisasi yang dilakukan. Mereka juga cenderung terlibat dalam upaya pencegahan di lingkungan setempat. Selain itu, data dari P2TP2A Kota Surabaya menyebutkan terjadi penurunan angka kasus baru 10% selama 3 tahun terakhir. Meskipun demikian, jumlah kasus yang terjadi masih di atas rata-rata nasional, sehingga diperlukan kerja sama bersama untuk pencegahan lebih lanjut guna mencapai tingkat perlindungan yang optimal bagi anak dan perempuan di Kota Surabaya.

4.5. Evaluasi internal Program

Temuan:

- Evaluasi rutin dilakukan melalui rapat secara bulanan dan tahunan.
- Aspek yang dievaluasi meliputi capaian target, kendala, saran perbaikan.

Analisis:

Evaluasi internal penting untuk menilai tingkat efektivitas program secara berkala. Hal ini dapat memastikan program tetap tuju dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Walaupun demikian, diperlukan evaluasi eksternal untuk penilaian yang lebih objektif.

Penelitian menemukan bahwa evaluasi internal telah berjalan dengan baik. Tim evaluasi melakukan rapat evaluasi setiap bulan untuk membahas capaian target, kendala, dan saran perbaikan dari masing-masing kegiatan. Hasil evaluasi kemudian ditindaklanjuti pada bulan berikutnya. Namun, diperlukan satu kali evaluasi eksternal setiap tahun oleh pihak independen agar hasilnya lebih komprehensif dan akuntabel. Saran perbaikan dari evaluasi internal juga tepat untuk meningkatkan kinerja program ke depan. Idealnya, evaluasi eksternal dapat melibatkan unsur akademisi dan lembaga independen untuk memperoleh pandangan yang obyektif. Hal ini penting untuk terus menjamin kualitas program perlindungan yang dijalankan.

4.6. Keterbatasan dan Tantangan Ke Depan

Temuan:

- Masih rendahnya partisipasi masyarakat.
- Keterbatasan anggaran untuk ekspansi program.

Analisis:

Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar perlindungan bersifat mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu, dukungan pemerintah dan donasi dengan tanggung jawab sosial perlu ditingkatkan agar program dapat berjalan optimal. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan yang lebih komprehensif di masa depan.

Survey menunjukkan hanya 45% masyarakat yang pernah terlibat aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Sementara itu, anggaran tahunan diperkirakan hanya mampu mendukung operasional program di 5 kecamatan saja. Padahal jangkauan perlu ditingkatkan ke seluruh wilayah Kota Surabaya. Mengingat kondisi tersebut, diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi warga seperti melalui relawan tetap di tingkat RT/RW. Kerja sama dengan lembaga tambahan juga dibutuhkan untuk penggalangan dana guna pengembangan program di masa mendatang. Dengan dukungan yang lebih besar, diharapkan perlindungan dapat lebih luas cakupannya dan berkelanjutan bagi anak serta perempuan Kota Surabaya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa program perlindungan perempuan dan anak yang dijalankan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Karang Taruna Kota Surabaya telah berjalan dengan cukup efektif walaupun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan. Program-program yang ditawarkan seperti pemberdayaan korban, pendampingan hukum, dan sosialisasi perlindungan telah tepat sasaran dan bermanfaat bagi korban maupun masyarakat secara umum. Kegiatan pendampingan langsung di lapangan dan sosialisasi secara terus-menerus juga berperan besar dalam memberikan perlindungan nyata dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan.

Manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti tumbuhnya kepedulian dan penurunan angka kasus baru menunjukkan bahwa program ini mampu berkontribusi positif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi internal pun berjalan dengan baik untuk menjamin kualitas pelaksanaan program. Akan tetapi, diperlukan peningkatan khususnya terkait dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat agar perlindungan berkelanjutan secara mandiri, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi keterbatasan anggaran guna pengembangan program di masa depan.

Selain itu, perlu adanya perbaikan diantaranya integrasi evaluasi eksternal oleh pihak independen untuk hasil yang lebih komprehensif dan objektif. Berdasarkan hasil penelitian, dicatat juga masih terdapat angka kasus baru yang cukup tinggi sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih intensif di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjamin perlindungan yang lebih maksimal, perlu adanya dukungan dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak terkait melalui program-program dan kerja sama yang tepat sasaran.

Dengan peningkatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

4.7 Pembahasan

Program perlindungan perempuan dan anak yang dijalankan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Karang Taruna Kota Surabaya dinilai telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat ruang yang dapat ditingkatkan. Program-program yang ditawarkan seperti pemberdayaan korban, pendampingan hukum, dan sosialisasi perlindungan terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi para korban maupun masyarakat pada umumnya. Kegiatan-kegiatan lapangan seperti pendampingan langsung di posko, pengadilan, maupun sosialisasi secara terbuka di masyarakat dinilai sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan nyata kepada korban sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan. Hal ini terbukti dari hasil survei dan wawancara yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan dan manfaat yang dirasakan. Evaluasi internal yang rutin dilakukan juga mendukung tercapainya tujuan program dengan baik melalui diskusi perbaikan berkala. Meski demikian, penilaian independen dari pihak eksternal perlu dilakukan untuk memperoleh umpan balik lebih komprehensif dan objektif. Beberapa saran yang dapat diajukan antara lain melibatkan tim evaluasi eksternal dari perguruan tinggi setempat untuk melakukan evaluasi program minimal satu tahun sekali. Hal ini diharapkan dapat menilai kinerja program secara lebih akuntabel. Selain itu, perlu adanya perwakilan korban dan masyarakat dalam tim tersebut agar hasil evaluasi lebih representatif.

Partisipasi masyarakat juga dapat ditingkatkan dengan menjadikan alumni korban pemberdayaan sebagai relawan tetap. Mereka dapat terlibat secara aktif dalam mensosialisasikan program serta membantu menyelesaikan masalah di tingkat rukun tetangga/rukun warga. Dengan berbagai upaya perbaikan yang terencana dan terukur, diharapkan perlindungan perempuan dan anak di Surabaya dapat terus meningkat secara berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Program perlindungan yang dijalankan oleh Karang Taruna dinilai sangat sesuai dengan kondisi masyarakat di Kota Surabaya yang masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meski telah mengalami penurunan. Program-program yang tersedia dibuat berdasarkan kebutuhan korban dan memfasilitasi upaya pemulihan yang menyeluruh. Hal ini sesuai prinsip perlindungan yang memberdayakan korban sekaligus mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Namun demikian, evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan untuk menyesuaikan perubahan kondisi. Misalnya dengan merespons angka kasus baru yang masih relatif tinggi dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pencegahan bersama masyarakat.

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak Karang Taruna untuk meningkatkan kualitas program secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang harmonis bebas kekerasan. Evaluasi independen yang melibatkan akademisi dapat menilai kinerja program secara obyektif. Sedangkan pemberdayaan relawan korban akan mendukung terciptanya pemberdayaan yang mandiri dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar perlindungan dapat berjalan secara partisipatif. Dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan perlindungan Kota Surabaya semakin komprehensif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna perlu berkelanjutan dengan terus menyesuaikan perubahan zaman. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mensosialisasikan program dan layanan bantuan. Website maupun aplikasi berita resmi dapat dirancang khusus untuk mendokumentasikan capaian program serta menyampaikan informasi terbaru.

Hal ini sangat penting mengingat generasi muda saat ini lebih akrab dengan media online. Mereka dapat dengan mudah mengakses informasi layanan bantuan apabila dibutuhkan. Selain itu, media sosial seperti Facebook dan Instagram dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat umum. Webinar dan podcast mengenai pencegahan kekerasan dan perlindungan hak-hak perempuan juga dapat menarik perhatian generasi milenial dan z. Bentuk konten yang ringkas namun informatif sangat tepat untuk mengedukasi mereka. Pemantauan terhadap media sosial perlu dilakukan untuk menanggapi setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat secara real time. Kerja sama dengan perguruan tinggi dapat dilakukan untuk mengintegrasikan pendidikan perilaku anti kekerasan di tingkat mahasiswa. Mahasiswa yang peduli dengan isu sosial dapat terlibat sebagai relawan digital yang menginformasikan program di kalangan rekan-rekannya. Mereka juga dapat membantu mengembangkan konten sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik generasi milenial.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program perlindungan dapat terus ditingkatkan secara inovatif dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemanfaatan media digital merupakan salah satu strategi cerdas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan sosialisasi program perlindungan. Akan tetapi, hal yang tidak kalah penting adalah penguatan sinergi dengan berbagai pihak terkait di tingkat lapangan. Kerja sama dengan aparat pemerintahan setempat misalnya kepolisian, kejaksaan, dan dinas sosial perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pencegahan maupun penanganan kasus.

Koordinasi yang terpadu diperlukan agar upaya perlindungan dapat berjalan secara menyeluruh, mulai dari tahap pendidikan hingga pengaduan, pelaporan, proses hukum, rehabilitasi hingga pemulihan korban. Ke depannya pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak secara resmi dapat menjadi solusi untuk mengoordinasikan seluruh pihak terkait secara integral. Komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan anggaran pun perlu terus ditingkatkan. Program perlindungan merupakan agenda prioritas yang sangat rentan terhadap isu profesionalitas dan akuntabilitas pelaksanaan. Keterlibatan pemerintahan dalam monitoring dan pemberian masukan akan mendukung terlaksananya program secara sesuai dengan target dan tujuan awal.

Dengan melanjutkan semangat kolaborasi multi-pihak yang telah terbangun selama ini, diyakini kapasitas perlindungan di Kota Surabaya dapat terus dibangun menyesuaikan perubahan situasi ke depannya. Selain melakukan sinergi dengan instansi pemerintah, kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan LSM yang peduli dengan isu gender juga perlu terus ditingkatkan. Kehadiran mereka dapat mensupport penanganan kasus dengan cara yang lebih komprehensif. Misalnya layanan konseling korban kekerasan, fasilitasi edukasi hukum kepada masyarakat, hingga advokasi terhadap pembentukan peraturan yang pro-perempuan dan anak. Dengan nature kerja yang lebih fleksibel, LSM turut ambil bagian penting untuk memperluas jangkauan program perlindungan, terutama ke kelompok rentan di pelosok desa yang kurang terjangkau oleh pemerintah.

Sementara itu, dukungan forum-forum masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, ORT serta organisasi sosial keagamaan maupun kampus sangat potensial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara voluntary dan berkelanjutan. Mereka dapat direkrut sebagai fasilitator di tingkat kelurahan atau RW untuk turut menyebarkan informasi mengenai pentingnya pendidikan gender serta hukum anti kekerasan. Dengan jaringan mereka yang luas, kontribusi nyata akan tercipta dalam membangun critical mass masyarakat peduli terhadap isu ini. Bentuk kolaborasi multi-pihak yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan fundamental perubahan. Oleh sebab itu, sistem jaringan dan kerangka kerja sama antar instansi harus terus dibangun dengan baik dan sinergi penuh demi memperkuat perlindungan secara utuh di Surabaya. Ke depan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membawa perubahan nyata bagi pemenuhan hak asasi manusia kelompok rentan.

Selain kerja sama dengan berbagai pihak, penguatan kapasitas sumber daya manusia yang ada juga menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutannya program perlindungan di Surabaya. Tim tenaga keahlian yang terlibat perlu didorong untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya, baik melalui pelatihan formal maupun sharing session secara berkala. Upaya peningkatan kapasitas ini perlu diinternalisasikan sebagai budaya kerja di lingkungan Karang Taruna. Kapasitas tim penanganan kasus misalnya dapat ditingkatkan untuk mampu memberikan layanan konseling dan pendampingan yang sesuai dengan standar profesional. Sementara bagi fasilitator di masyarakat, mereka perlu diajarkan teknik-teknik penyuluhan yang mudah dipahami dan tindak lanjutnya. Evaluasi berkelanjutan terhadap proses capacity building ini perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan respons masyarakat.

Selain itu, praktik budaya anti kekerasan juga perlu ditanamkan sejak dini, termasuk di lingkungan sekolah dan kampus. Pesan-pesan toleransi dan nondiskriminasi dapat disosialisasikan lewat berbagai kegiatan, seperti lomba menulis, drama, hingga kampanye digital. Partisipasi generasi muda dalam membangun inklusivitas diharapkan dapat memperkuat perlindungan secara turun-temurun. Dengan memperkuat tata kelola kualitas SDM secara terpadu, program-program

perlindungan di Surabaya akan semakin berdaya guna untuk memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan. Capaian program perlindungan perempuan dan anak selama ini tidak terlepas dari peran strategis para pemangku kepentingan dalam mendukung penuh upaya ini. Namun demikian, dukungan berkelanjutan yang bersumber dari masyarakat luas juga sama pentingnya. Oleh karena itu, perlu dititikberatkan pembinaan social movement yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Salah satu cara yang tepat adalah dengan menumbuhkembangkan jaringan relawan perubahan yang peduli dengan isu kesetaraan gender dan HAM. Sukarelawan dapat direkrut dari berbagai kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang. Mereka kemudian dilatih untuk menjadi agen perubahan yang turut menyebarkan informasi serta mendorong partisipasi masyarakat lainnya. Seminar dan lokakarya inspiratif dapat diadakan berkala untuk memotivasi relawan agar terus aktif di lapangan. Sosialisasi humas juga intens dipublikasikan guna menginspirasi generasi muda agar tergerak untuk turut berperan dalam mendorong perubahan. Inovasi program relawan seperti kolom Warga Peduli di media sosial bisa ditayangkan untuk memperkuat jaringan solidaritas.

Dengan menumbuh kembangkan jiwa kerelawanan dan solidaritas masyarakat, harapannya gerakan sosial akan semakin kuat dalam mendorong terciptanya budaya intoleransi terhadap kekerasan serta membela hak asasi perempuan dan anak. Selain penguatan social movement, untuk mendukung keberlanjutan program perlindungan jangka panjang diperlukan dukungan regulasi yang kuat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penanggulangan kekerasan berbasis gender.

Perda ini dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program serta sinergi kebijakan antar instansi. Isinya perlu mencakup komitmen pemerintah dalam alokasi anggaran yang memadai untuk program perlindungan secara khusus. Perda ini perlu didahului dengan studi kelayakan serta sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, dorongan untuk merevisi peraturan yang ada seperti UU Perlindungan Perempuan dan UU Kekerasan Seksual agar lebih progresif dan memberikan perlindungan yang lebih luas juga perlu dilakukan. Kehadiran regulasi ini nantinya akan mendukung terwujudnya prinsip non-diskriminasi serta pemenuhan hak asasi yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan. Dengan dukungan payung hukum dan kebijakan yang kuat, diharapkan perlindungan perempuan dan anak di Surabaya dapat semakin kuat landasannya untuk mewujudkan tujuan filosofis pembangunan manusia.

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, program perlindungan perempuan dan anak yang dijalankan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Karang Taruna Kota Surabaya dapat dikatakan berjalan dengan baik walaupun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dirasakan masyarakat dan korban serta tingginya tingkat kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. Beberapa temuan penelitian menunjukkan perlu adanya upaya penyempurnaan, antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, memperluas cakupan program ke seluruh wilayah, meningkatkan upaya preventif bersama masyarakat, serta melibatkan evaluator eksternal dalam menilai kinerja program. Saran-saran ini diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program perlindungan di masa mendatang.

Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat antar instansi terkait, peningkatan partisipasi seluruh pihak, penguatan regulasi pendukung, serta penguatan kapasitas SDM, diyakini program perlindungan akan semakin optimal untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kota Surabaya. Upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak merupakan kunci bagi keberlanjutan perlindungan serta pencapaian tujuan filosofis pembangunan kesejahteraan masyarakat secara utuh.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program perlindungan perempuan dan anak yang dijalankan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Karang Taruna Kota Surabaya memiliki dampak positif yang cukup signifikan dalam memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi korban kekerasan. Hal ini terlihat dari manfaat dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat yang terlayani.

Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan untuk menjamin berkelanjutan dan optimalnya perlindungan di masa depan. Beberapa poin utama yang perlu mendapat perhatian lebih adalah meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program, memperluas jangkauan dan pendampingan ke seluruh wilayah, meningkatkan upaya preventif bersama stakeholder terkait, serta melibatkan pihak eksternal untuk menilai kinerja secara independen dan komprehensif.

Dengan terus mengimplementasikan saran-saran perbaikan tersebut sesuai kapasitas dan kondisi di lapangan, diyakini program akan terus meningkat kualitas dan relevansinya guna memberdayakan korban maupun mensosialisasikan pentingnya perlindungan di masyarakat. Upaya kolaborasi multi-pihak dan penguatan regulasi juga dinilai perlu terus digalakkan guna memberikan payung hukum yang kuat bagi perlindungan di masa depan. Semua upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan utama pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya secara berkelanjutan melalui pemenuhan hak asasi setiap warganya, khususnya kelompok rentan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih atas informasi dan dukungannya selama ini, Mei Rukmana, SH, MH selaku Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Karang Taruna Kota Surabaya. Kontribusi serta masukan dari beliau telah membantu peneliti dalam memahami secara mendalam strategi komunikasi yang dijalankan oleh Karang Taruna dalam membangun perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya ini. Penelitian ini bukan hanya menguraikan capaian positif yang dicapai melalui struktur dan program yang diterapkan, namun juga memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan harapan di masa depan untuk terus meningkatkan peran yang dimainkan. Umpan balik berharga yang diberikan Mei Rukmana kepada peneliti sangat bermanfaat untuk memahami dinamika lapangan secara aktual. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi perkembangan program perlindungan di masa mendatang. Terima kasih atas dukungan dan inspirasi yang telah diberikan untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Surabaya. Kerja sama yang terjalin dengan baik antara semua pihak akan terus menentukan arahan positif perlindungan di masa depan.

Daftar Pustaka

- [1] Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Peneliffian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- [2] Sunoto, I., & Nulhakim, A. L. (2017). Mengukur Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Dengan Pendekatan Metode Fuzzy Inference System Mamdani. *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 711. <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1585>
- [3] Suradi, S. (2019). Karang Taruna, Agen Perubahan Dan Pengembangan Masyarakat Di Pandeglang. *Sosio Konsepsia*, 8(3), 241–254. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i3.1676>
- [4] K. N. P. Indonesia, ‘Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2020’, Jakarta, 2020, [Online]. Available: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1452.1614420163.pdf>.
- [5] H. Geertz, *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- [6] F. Magnis-Suseno, *Etika Jawa. Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia, 1988.
- [7] B. R. O. Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. New York: Cornell University Press, 1992.
- [8] M. Pabottingi, ‘Bahasa, Politik, dan Ototentrisitas’, in *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Pangung Orde Baru*, Y. Latif and I. S. Ibrahim, Eds. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- [9] A. M. Firdaus, ‘Sakit Hati Dicaci, Suami Tega Bunuh Istri’, *ayoBandung.com*, Jakarta, p. 1, Apr. 29, 2019.
- [10] O. Monalisa, ‘Suami Tega Bunuh & Lepas Celana Istri Agar Dikira Korban Perkosaan, Ternyata Sakit Hati Dicaci Maki’, *Tribunnewsmaker.com*, Jakarta, p. 1, Feb. 09, 2020.
- [11] N. L. Saputri, ‘Sakit Hati Kerap Dimarahi, Suami Tega Bunuh Istri Lalu Kabur dan Berpindah-pindah Tempat’, *Tribunnews.com*, Jakarta, p. 1, Dec. 14, 2020.
- [12] D. Asri, I. Revita, and Y. Maputra, ‘“Being Polite when Being Violated”: The Analysis of Perlocutionary Act of The Victims of Domestic Violence’, in *Contributions of Humanities and Social Sciences on the Direction of Malay Studies in the Era of Industry 4.0*, Padang, 2019, doi: <https://doi.org/10.2478/9783110680003-011>.
- [13] Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2021). *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)*. Surabaya: BPS Kota Surabaya.
- [14] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. (2020). *Laporan Aktivitas Program Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2020*. Surabaya: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
- [15] Karang Taruna Kota Surabaya. (2021, September 20). Profil [Facebook page]. Facebook. <https://www.facebook.com/KarangTarunaSurabaya>

- [16] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2014). Mekanisme Perlindungan dan Pemulihan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- [17] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- [18] Septiawan, D. R. (2017). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Program Perlindungan Perempuan dan Anak. *Jurnal Wiyata*, 12(1), 103-123. <https://doi.org/10.22146/jw.16133>
- [19] World Bank Group. (2021). *Gender-Based Violence*. Washington D.C: World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls>